

Pengadilan Agama Tulungagung

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

Jl. Ir. Soekarno Hatta No 117 Tulungagung - 66261



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ir. Soekarno - Hatta No.117

Telp. 0355-336516 Fax. 0355-336121

Tulungagung - Jawa Timur 66261

e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah salah satu Entitas Akuntansi dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Standar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tulungagung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Tulungagung, 22 Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,

Matuhin, S.H.

NIP. 19650420 199203 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
VI. Lampiran dan Daftar	

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117 Tulungagung - Jawa Timur 66261
Telp. 0355-336516 Fax. 0355-336121 e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Tulungagung, 22 Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,

Maftuhin, S.H.

NIP-19650420 199203 1 004

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung per 31 Desember 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 15.708.250,- atau mencapai 2443 persen dari estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 643.000,-

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 8.134.291.089,- atau mencapai 99,75 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.154.358.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018 .

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 27.562.470.002,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 2.130.400,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 27.560.339.602; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 12.388.085,- dan Rp. 27.550.081.917,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. Rp. 13.708.000,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 8.297.879.423,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (8.284.171.423,-). Untuk Kegiatan Non Operasional terdapat defisit sebesar Rp. (272.075,-) dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (8.284.443.498,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 12.467.320.339,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (8.284.443.498,-), ditambah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar Rp. 0,-, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 8.118.582.839,-, mengalami kenaikan Ekuitas sebesar Rp. 15.082.761.578,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp. 27.550.081.917,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	643.200	15.708.250	2442,20	18.846.159
JUMLAH PENDAPATAN		643.200	15.708.250	2442,20	18.846.159
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	7.029.843.000	7.021.468.893	99,88	6.303.361.441
Belanja Barang	B.4	937.265.000	925.622.196	98,76	954.893.129
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		7.967.108.000	7.947.091.089	99,75	7.258.254.570
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	187.250.000	187.200.000	99,97	232.357.000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		187.250.000	187.200.000	99,97	232.357.000
JUMLAH BELANJA		8.154.358.000	8.134.291.089	99,75	7.490.611.570

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	2.130.400	4.443.850
Jumlah Aset Lancar		2.130.400	4.443.850
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	19.834.552.000	5.080.670.125
Peralatan dan Mesin	C.14	2.023.711.373	1.836.511.373
Gedung dan Bangunan	C.15	6.858.111.000	8.660.434.700
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	692.446.000	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	5.194.870	5.194.870
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(1.853.675.641)	(3.097.118.808)
Jumlah Aset Tetap		27.560.339.602	12.485.692.260
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	74.970.850	74.970.850
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(74.970.850)	(74.970.850)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		27.562.470.002	12.490.136.110
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	10.388.085	22.815.771
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	2.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		12.388.085	22.815.771
JUMLAH KEWAJIBAN		12.388.085	22.815.771
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	27.550.081.917	12.467.320.339
JUMLAH EKUITAS		27.550.081.917	12.467.320.339
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27.562.470.002	12.490.136.110

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	13.708.000	18.845.940
JUMLAH PENDAPATAN		13.708.000	18.845.940
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	7.008.266.705	6.283.559.835
Beban Persediaan	D.3	22.493.850	38.052.280
Beban Barang dan Jasa	D.4	579.608.727	561.884.941
Beban Pemeliharaan	D.5	269.273.346	297.062.909
Beban Perjalanan Dinas	D.6	57.061.900	55.160.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	361.174.895	287.012.657
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		8.297.879.423	7.522.732.622
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8.284.171.423)	(7.503.886.682)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
OPERASIONAL		(272.075)	(72.651)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(8.284.443.498)	(7.503.959.333)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(8.284.443.498)	(7.503.959.333)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMATULUNGAGUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	12.467.320.339	12.541.270.617
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(8.284.443.498)	(7.503.959.333)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI ASET TETAP	E.4	-	-
SELISIH REVALUASI BMN	E.5	16.994.791.217	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.6	(1.746.168.980)	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	(41.756.356)
Jumlah Lain-Lain		15.248.622.237	(41.756.356)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	8.118.582.839	7.471.765.411
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS	E.8	15.082.761.578	(73.950.278)
EKUITAS AKHIR		27.550.081.917	12.467.320.339

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tulungagung

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas 1A merupakan Yuridikasi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117 Tulungagung. Visi Pengadilan Agama Tulungagung adalah Visi Pengadilan Agama Tulungagung adalah Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan tetap memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, biaya rendah bagi masyarakat.

Misi Pengadilan Agama Tulungagung adalah :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum dari masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Tulungagung melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.
8. Meningkatkan SDM yang professional dan berintegritas tinggi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan (*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan

dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 15.708.250,- atau mencapai 2443 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 643.000,- Pendapatan Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dan Persekot Gaji. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi Per 31 Desember 2018	% Real Angg.
Pendapatan Sewa	643.000	4.621.800	718,79
Pendapatan Lain-lain	-	11.086.450	-
Jumlah	643.000	15.708.250	2.442,96

Realisasi Pendapatan Sewa per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar (16,65) persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan karena realisasi Pendapatan Sewa tidak mengalami kenaikan yang berasal dari sewa tanah untuk ATM. Sedangkan Realisasi Pendapatan Lain-lain Per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 27,08 persen dibandingkan TA 2017. Penurunan ini berasal dari adanya penurunan aktifitas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 250,- dan Penerimaan Kembali Persekot Gaji sebesar Rp. 11.086.200,-.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI Per 31 Desember 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa	4.621.800	3.643.200	26,86
Pendapatan Lain-lain	11.086.450	15.202.959	-27,08
Jumlah	15.708.250	18.846.159	-16,65

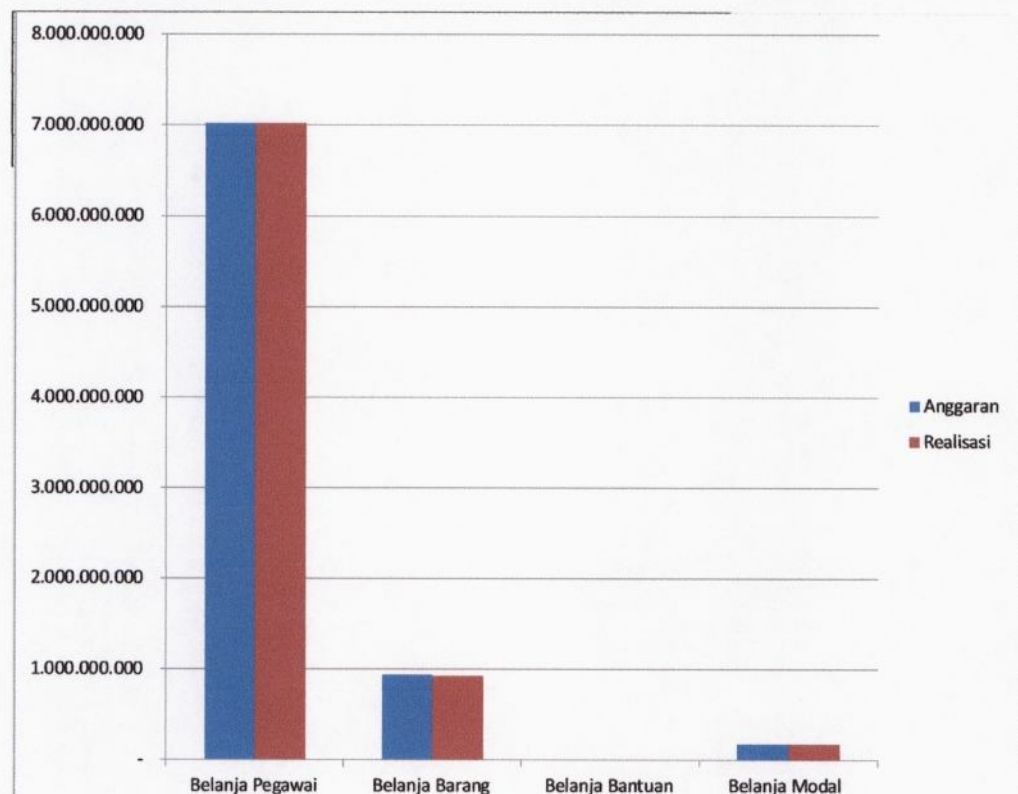
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 8.134.291.089,- atau sebesar 99,75 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 8.154.358.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2018

URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	% Real Angg
Belanja Pegawai	7.029.843.000	7.021.468.893	99,88
Belanja Barang	937.265.000	925.622.196	98,76
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	187.250.000	187.200.000	99,97
Total Belanja Kotor	8.154.358.000	8.134.291.089	99,75
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	8.154.358.000	8.134.291.089	99,75

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,59 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena bertambahnya anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada TA 2018, serta meningkatnya aktifitas belanja barang dan belanja modal pada TA 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Per per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI Per 31 Desember 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	7.021.468.893	6.303.361.441	11,39
Belanja Barang	925.622.196	954.893.129	(3,07)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	187.200.000	232.357.000	(19,43)
Jumlah	8.134.291.089	7.490.611.570	8,59

Belanja Pegawai
Rp.7.021.468.893,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.021.468.893,- dan Rp. 6.303.361.441,-. Realisasi belanja per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 11,39 persen dari TA 2017. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah pegawai di Tahun 2018.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI Per 31 Desember 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.741.863.737	6.040.328.195	11,61
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	0	0	-
Belanja Uang Makan	282.006.000	263.034.000	7,21
Jumlah Belanja Kotor	7.023.869.737	6.303.362.195	11,43
Pengembalian Belanja Pegawai	(2.400.844)	(754)	-
Jumlah Belanja	7.021.468.893	6.303.361.441	11,39

Belanja Barang
Rp.925.622.196,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 925.622.196,- dan Rp. 954.893.129,-. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 3,07 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya penurunan anggaran dan aktifitas belanja barang di TA 2018.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI Per 31 Desember 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	478.606.425	503.741.579	(4,99)
Belanja Barang Non Operasional	13.893.850	15.774.000	(11,92)
Belanja Jasa	113.776.675	101.948.291	11,60
Belanja Pemeliharaan	262.283.346	278.269.259	(5,74)
Belanja Perjalanan	57.061.900	55.160.000	3,45
Jumlah Belanja Kotor	925.622.196	954.893.129	(3,07)
Pengembalian Belanja		-	-
Jumlah Belanja	925.622.196	954.893.129	(3,07)

*Belanja Bantuan
Sosial Rp. 0,-*

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017. Sehingga tidak ada realisasi per 31 Desember 2018 maupun TA 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	0,00
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Tanah Rp. 0,-*

B.6 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017. Sehingga tidak ada realisasi per 31 Desember 2018 maupun TA 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp.187.200.000,-

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 187.200.000,- atau mengalami penurunan sebesar (19,43) persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 sebesar Rp.232.357.000,- Hal ini disebabkan karena Anggaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin pada TA 2018 mengalami penurunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	Realisasi per 31 Desember 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
CCTV	0	13.000.000	(100,00)
Pengadaan PC	0	40.000.000	(100,00)
Pengadaan Laptop	75.000.000	14.750.000	408,47
Pengadaan printer	0	7.500.000	(100,00)
Pengadaan router	-	0	-
Pengadaan Scanner	-	0	-
Pengadaan finger print	0	7.000.000	-
Pengadaan TV LED	0	20.000.000	-
Pengadaan UPS	0	20.000.000	-
Pengadaan ATR	0	27.000.000	-
Pengadaan E-Skum	0	20.000.000	-
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor	112.200.000	63.107.000,00	-
Jumlah Belanja Kotor	187.200.000	232.357.000,00	-19,43
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	187.200.000	232.357.000	-19,43

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp. 0,-

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan TA 2017, Sehingga tidak ada realisasi per 31 Desember 2018 maupun TA 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI Per 31 Desember 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp. 0,-

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan TA 2017, Sehingga tidak ada realisasi per 31 Desember 2018 maupun TA 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2018	T.A 2017	NAIK (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Lainnya Rp.0,-

B.10 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018 dan TA 2017, Sehingga tidak ada realisasi per 31 Desember 2018 maupun TA 2017.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Bank BRI	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp. 0,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Bank BRI	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp. 0,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TH 2018	TH 2017
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	0
Pajak PPh yang belum disetor	-	0
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	0
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	0
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp. 0,-

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TH 2018	TH 2017
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Rp. 0,-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Nihil	-	-
	Jumlah	-	-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA
Rp. 0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2018	TH 2017
1	NIHIL	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp. 0,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Belanja Dibayar di Muka
Rp.2.000.000,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dan Rp. 0,-. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari belanja sewa dibayar dimuka (prepaid) yang telah dibayarkan secara penuh. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TH 2018	TH 2017
Persekot Gaji	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	2.000.000	-
Jumlah	2.000.000	-

Persediaan Rp.
2.130.400,-

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.130.400,- dan Rp. 4.443.850,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2018	TH 2017
Barang Konsumsi	2.107.500	4.115.250
Bahan untuk Pemeliharaan	22.900	328.600
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	2.130.400	4.443.850

Semua jenis persediaan tersebut pada saat tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp. 0,-

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	Tahun 2018	Tahun 2017
1	NIHIL	-	-
		-	-
Jumlah		-	-

TPA
Rp. 0,-

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TH 2018	TH 2017
1	NIHIL	-	-
		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp. 0,-

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp. 19.834.552.000,-

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Tulungagung per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 19.834.552.000,- dan Rp. 5.080.670.125,-. Adanya kenaikan nilai aset tetap Tanah dikarenakan adanya Revaluasi BMN. Nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	5.080.670.125
Mutasi tambah : Revaluasi BMN	14.753.881.875
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per tanggal 31 Desember 2018	19.834.552.000

Rincian saldo Tanah per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	9.196 m2	Jl Ir. Soekarno Hatta No. 5, Tulungagung	18.362.737.000
2	724 m2	Jl. Pahlawan III No 1, Tulungagung	836.629.000
3	544 m2	Jl. Pahlawan III No 1, Tulungagung	635.186.000
Jumlah			19.834.552.000

Peralatan dan Mesin

Rp. 2.023.711.373,-

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 2.023.711.373,- dan Rp. 1.836.511.373,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	1.836.511.373
Mutasi tambah:	
Pembelian	187.200.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2018	2.023.711.373
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(1.662.068.361)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	361.643.012

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

Pembelian / Pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 187.200.000,-.

Gedung dan Bangunan
Rp. 6.858.111.000,-

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 6.858.111.000,- dan Rp. 8.660.434.700,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	8.660.434.700
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	(1.802.323.700)
Saldo per 31 Desember 2018	6.858.111.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(171.973.338)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	6.686.137.662

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp. 692.446.000,-

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 692.446.000,- dan Rp. 0,-. Dikarenakan adanya Revaluasi BMN di Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal pelaporan sehingga disajikan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	-
Mutasi tambah: Revaluasi BMN	692.446.000
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2017	692.446.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2017	(19.633.942)
Nilai Buku Per 31 Desember 2017 2017	672.812.058

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp. 5.194.870,-

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 5.194.870,- dan Rp. 5.194.870,- Aset tetap tersebut berupa barang ekstrakomtabel dikarenakan barang tersebut mempunyai nilai harga dibawah nilai kapitalisasi. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2018. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp. 0,-

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2018. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
aset Tetap Rp.
((1.853.675.641,-)

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp. (1.853.675.641,-) dan Rp. (3.097.118.808,-) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.023.711.373	1.662.068.361	361.643.012
2	Gedung dan Bangunan	6.858.111.000	171.973.338	6.686.137.662
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	692.446.000	19.633.942	672.812.058
4	Aset Tetap Lainnya	5.194.870	0	5.194.870
Akumulasi Penyusutan		8.887.017.243	1.853.675.641	7.725.787.602

Aset Tak Berwujud Rp.
0,-

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tidak ada Aset Tak Berwujud pada tanggal

pelaporan dan disajikan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2018	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
NIHIL	0
	0
Jumlah	0

Aset Lain-Lain Rp.
74.970.850,-

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 74.970.850,- dan Rp. 74.970.850,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	74.970.850
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2018	74.970.850
Akumulasi Penyusutan	(74.970.850)
Nilai Buku per 30 September 2018	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp.(74.970.850)

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp. (74.970.850,-) dan Rp. (74.970.850,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai

berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	74.970.850	(74.970.850)	0
Jumlah	74.970.850	(74.970.850)	0

Uang Muka dari KPPN
Rp. 0,-

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp. 10.388.085,-

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 10.388.085,- dan Rp. 22.815.771,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	
Belanja barang yang masih harus dibayar	10.388.085	Beban , Listrik, Telepon
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	
Total	10.388.085	

Pendapatan Diterima di
Muka Rp.2.000.000,-

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- dan Rp. 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan

pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Tidak ada Pendapatan Diterima di Muka pada pelaporan ini. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
NIHIL	-
Total	-

*Ekuitas Rp.
27.550.081.917,-*

C.26 Ekuitas

Ekuitas per per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.550.081.917,- dan Rp. 12.467.320.339,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp. 13.708.000,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 13.708.000,- dan Rp. 18.846.940,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa	2.621.800	3.643.200	(28,04)
Pendapatan Lain-lain	11.086.200	15.202.740	(27,08)
Jumlah	13.708.000	18.845.940	(27,26)

Pendapatan Sewa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2018.

Beban Pegawai Rp.
7.008.266.705,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.008.266.705,- dan Rp. 6.283.559.835,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.896.040.200	1.950.386.900	(2,79)
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.789	21.432	(12,33)
Beban Tunjangan-Tunjangan	4.837.917.716	4.073.177.503	18,78
Beban Uang Makan	274.290.000	259.974.000	5,51
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	7.008.266.705	6.283.559.835	11,53

Beban Persediaan
Rp. 22.493.850,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.493.850,- dan Rp. 38.052.280,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis

pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	22.493.850	38.052.280	(40,89)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	22.493.850	38.052.280	(40,89)

*Beban Barang dan
Jasa
Rp.579.608.727,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 579.608.727,- dan Rp. 561.884.941,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Listrik	112.063.398	98.703.217	13,54
Beban Langganan Telepon	2.487.779	3.245.074	(23,34)
Beban Barang Keperluan perkantoran	389.370.000	359.785.000	8,22
Beban Jasa Pengiriman Surat Dinas	3.283.700	3.597.650	(8,73)
Beban Barang Operasional Lainnya	14.810.000	24.500.000	(39,55)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	43.700.000	42.600.000	0,00
Beban Bahan	13.893.850	15.774.000	0,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	13.680.000	0,00
Jumlah	579.608.727	561.884.941	3,15

*Beban
Pemeliharaan Rp.
269.273.346,-*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 269.273.346,- dan Rp. 297.062.909,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	161.108.900	189.902.200	(15,16)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	24.440.900	24.447.900	(0,03)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.733.546	63.919.159	20,05
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6.990.000	18.793.650	(62,81)
Jumlah	269.273.346	297.062.909	(9,35)

Beban Perjalanan
Dinas Rp.
57.061.900,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 57.061.900,- dan Rp. 55.160.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	54.811.900	52.910.000	3,59
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000	2.250.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	-	-
Jumlah	57.061.900	55.160.000	3,45

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp. 0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
NIHIL	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Bantuan
Sosial Rp. 0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial

untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	% NAIK (TURUN)
NIHIL	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp.
361.174.895,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 361.174.895,- dan Rp. 287.012.657,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	139.569.725	113.799.767	22,65
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	201.971.228	173.212.890	16,60
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	19.633.942	-	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	
Jumlah Penyusutan	361.174.895	287.012.657	25,84
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	361.174.895	287.012.657	25,84

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp. 0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak ada Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	0	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Lain-lain
Rp.0,-

D.11. Beban Lain-lain

Tidak terdapat jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.
(272.075),-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. (272.075,-) dan Rp. (72.651),-. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Surplus / (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Surplus/ (Defisit) Dari Kgt Non Operasional lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	250	219	14,16
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	439.375	1.143.880	(61,59)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(711.700)	(1.216.750)	(41,51)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(272.075)	(72.651)	274,50

Pos Luar Biasa
Rp.0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
12.467.320.339,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.467.320.339,- dan Rp. 12.541.270.617,-

*Defisit LO
Rp.
(8.284.443.498,-)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. (8.284.443.498,-) dan Rp. (7.503.959.333,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp. 0,-*

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat koreksi nilai persediaan untuk tahun 2018 dan 2017. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

*Koreksi Aset Tetap
Rp.0,-*

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Tidak terdapat koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2018 dan 2017.

*Selisih Revaluasi
BMN Rp.
16.994.791.217,-*

E.5 Selisih Revaluasi BMN

Selisih Revaluasi BMN per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing masing ; Rp. 16.994.791.217,- dan Rp. 0,-

Rincian Selisih Revaluasi BMN :

Jenis	Jumlah
Revaluasi Aset Tetap	16.994.794.217
	-
Jumlah	16.994.794.217

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp.(1.746.168.980)
,-

E.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. (1.746.168.980),- dan Rp. 0,- adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Jenis	Koreksi
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	(1.746.168.980)
	-
Jumlah	(1.746.168.980)

Transaksi Antar
Entitas Rp.
8.118.582.839,-

E.7 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.118.582.839,- dan Rp. 7.471.765.411,-.

Kenaikan /
penurunan Ekuitas
Rp. 15.082.761.578,
-

E.8 Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Kenaikan / penurunan Ekuitas Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.082.761.578,- dan Rp. (73.950.278),-.

Ekuitas Akhir Rp.
27.550.081.917,-

E.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.550.081.917,- dan Rp. 12.467.320.339,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam Laporan Keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak Ada.

Lampiran A1

Pengadilan Agama Tulungagung
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Tot. Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2018	Per 31-12-2018	Per 31-12-2018	Per 31-12-2018
A	Tanah						
1	Tanah	-	19.834.552.000	-	-	-	19.834.552.000
	Jumlah		19.834.552.000	-	-	-	19.834.552.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	410.856.703	386.079.603	24.777.100	410.856.703	-
2	Alat Kantor	5	157.308.400	104.385.600	11.013.400	115.399.000	41.909.400
3	Alat Rumah Tangga	5	671.565.620	510.804.620	23.203.000	534.007.620	137.558.000
4	Alat Studio	5	45.199.300	19.886.800	5.625.000	25.511.800	19.687.500
5	Alat Komunikasi	5	18.327.000	12.027.000	1.400.000	13.427.000	4.900.000
6	Komputer Unit	4	592.491.500	401.195.913	53.988.725	455.184.638	137.306.862
7	Peralatan Komputer	4	127.962.850	88.119.100	19.562.500	107.681.600	20.281.250
	Jumlah		2.023.711.373	1.522.498.836	139.569.725	1.662.068.361	361.643.012
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	5.818.706.000	936.649.783	143.626.850	143.626.850	5.675.079.150
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	601.181.000	101.017.059	18.386.852	18.386.852	582.794.148
3	Tugu/Tanda Batas	50	438.224.000	536.953.330	39.957.526	9.959.636	428.264.364
	Jumlah		6.858.111.000	1.574.620.172	201.971.228	171.973.338	6.686.137.662
D	Jaringan						
	Jumlah						
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
	Jumlah		0	-	-	-	-
F	Jalan dan Jembatan	50	307.004.000		7.397.688	7.397.688	299.606.312
	Jumlah		307.004.000	-	7.397.688	7.397.688	299.606.312
G	Irigasi	50	385.442.000		12.236.254	12.236.254	373.205.746
	Jumlah		385.442.000	-	12.236.254	12.236.254	373.205.746
H	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan tercetak	0	5.194.870	-	-	-	5.194.870
	Jumlah		5.194.870	-	-	-	5.194.870
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-
2	Alat Kantor	5	7.306.000	7.306.000	-	7.306.000	-
3	Alat Rumah Tangga	5	3.695.000	3.695.000	-	3.695.000	-
4	Alat Studio	5	952.000	952.000	-	952.000	-
5	Alat Komunikasi	5	176.000	176.000	-	176.000	-
6	Komputer Unit	4	57.313.850	57.313.850	-	57.313.850	-
7	Peralatan Komputer	4	4.353.000	4.353.000	-	4.353.000	-
	Jumlah		74.995.850	4.353.000	-	74.995.850	-
Total			29.489.011.093	3.101.471.808	361.174.895	1.928.671.491	27.560.339.602